

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Al,Wisnubroto. 2002. Praktek Peradilan Pidana (Proses Peradilan Perkara Pidana), PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, Hal 67-74
- Ali Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Sinar Grafika.Jakarta.Hal 27-47.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pangantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo,Jakarta. Hal 117-143
- Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi revisi), Sinar Grafika,Jakarta. Hal 10-37
- Ashshofa Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 103-153.
- Atmasasmita R. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Hal 2-16
- Barda Nawawi Arief. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung. Hal 40-58
- Eddyono,SW, dkk. 2009. Perlindungan saksi dan Korban, Perlindungan Saksi 1,ELSAM. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum. Jakarta. Hal 1-19
- _____, Perlindungan saksi dan Korban, Perlindungan Saksi 2,ELSAM. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum. Jakarta, Hal 1-17
- _____, Perlindungan saksi dan Korban, Perlindungan Saksi 3,ELSAM. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum. Jakarta. Hal 1-16
- Effendi R, Andi Lolo. 2002. Azas-azas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Hal 23-40
- Harahap yahya.2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 13-20, 342-347
- _____.2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 273-318

- Jimmy Asshiddiqie. 2007. pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Indonesia Paska Reformasi. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. Hal
- Muhadar, Abdullah E dan Thamrin H. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. ITS Press. Surabaya. Hal 13-40, 169-187, 206-220
- Muladi. 2009. hak Azasi Manusia, Politik, Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 99-119
- Marpaung Leden. 2011. Penyidikan dalam Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Pertama, Edisi ke-2. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 54-68.
- Nyoman Serikat Putra. 2006. Sistem Peradilan Pidana, Bahan kuliah Ilmu Hukum UNDIP dan UNTAG, Semarang. Hal 34-58
- Sugandi. 1981. KUHAP dan Pejelasanannya. Usaha Nasional. Surabaya. Hal 330-338
- Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta. Jakarta.
- Yanlua muhdar. 2010. Ilmu Hukum. Penerbit Graha Guru. Yogyakarta. Hal 2-21

B. ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH DAN KORAN

- Akrial Zul, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. www.Legalitas.Org.2008
- Imran Yed, Administrasi Peradilan Pidana Indonesia. www.Legalitas.Org.2007
- Indonesia, Sekilas Tinjauan Kritis Mengenai Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Http/Bahan tesis AHRC Indonesia. 2007
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Laporan Perkembangan satu Tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. 2009
- Media Hukum; Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2002 Tentang cara Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. 2002.
- Pandangan Presiden Terhadap Rancangan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban. www.Legalitas.Org.2011
- Putra A.M, Kelemahan KUHAP dari Segi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. Http/bahan kuliah AHRC Indonesia Website. 2009

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penghentian perlindungan saksi dan korban

RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

